



ISSN 2621- 458X

Enhancing MSME Capacity in Barru Regency: Government Policies and Development of Competitive Products

Peningkatan Kapasitas UMKM di Kabupaten Barru: Kebijakan Pemerintah dan Pengembangan Produk Unggulan.

Dian Pratiwi
STIA Al Gazali Barru
dianpratiwi@algazali.ac.id

ABSTRACT

This study aims to explore government policies aimed at enhancing the competitive products of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Barru Regency and to identify the factors hindering their implementation. The research employs a qualitative approach, utilizing both primary and secondary data. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation, while data analysis is carried out through stages of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion verification. The findings indicate that government policies for improving the flagship products of MSMEs in Barru Regency are evaluated positively based on six indicators: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. However, significant hindrances have been identified, including limited financial resources and insufficient participation from MSME operators in government programs.

Keywords: Government Policy, MSMEs, Flagship Products, Barru Regency



lisensi CC BY

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan produk unggulan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Barru serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, sementara analisis data dilakukan melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam meningkatkan produk unggulan UMKM di Kabupaten Barru dinilai baik berdasarkan enam indikator: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Namun, terdapat faktor-faktor penghambat yang signifikan, yaitu terbatasnya biaya dan kurangnya pelaku usaha yang dapat mengikuti program pemerintah.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, UMKM, Produk Unggulan

A. PENDAHULUAN

Pengembangan produk unggulan UMKM merupakan salah satu prioritas kebijakan pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Barru, kebijakan pemerintah berperan penting dalam meningkatkan daya saing UMKM melalui berbagai program dan insentif. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pencapaiannya.

Selain itu, fokus penelitian ini juga mencakup analisis bagaimana kebijakan yang diterapkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik UMKM di Kabupaten Barru. Carl Friedrich (Awan dan Yudi, 2016:16-17) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencari tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Ealau dan Pewitt (Uddin dan Sobirin, 2017) kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuat maupun yang melaksanakan kebijakan tersebut.

Pemerintah adalah suatu organisasi yang mempunyai kekuasaan mengambil keputusan dalam suatu negara berupa penegakan peraturan perundang-undangan dan bertugas mengatur sistem pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintahan (Nurul, 2022:18).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh UMKM lokal dan menawarkan rekomendasi strategis untuk memperbaiki dan mengoptimalkan kebijakan yang ada. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika lokal, kebijakan pemerintah dapat lebih efektif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan keberhasilan UMKM, yang pada gilirannya dapat memberikan dampak positif pada ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1. Data UMKM Berdasarkan Golongan Usaha

No	Golongan Usaha	Jumlah	Persentase
1	Usaha Mikro	9.219	92%
2	Usaha Kecil	718	7%
3	Usaha Menengah	72	1%
	Jumlah	10.019	100%

Sumber: Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab.Barru

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan golongan usaha yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat yaitu usaha mikro dengan jumlah 9.219 usaha yang mencakup 92% dari total usaha UMKM di kabupaten barru, dan usaha kecil dengan jumlah 718 usaha UMKM sedangkan usaha menengah sebesar 72 usaha yang hanya mencakup 1% dari total keseluruhan usaha UMKM

Banyak sekali strategi-strategi yang dilakukan pelaku bisnis UMKM yang ada di Kabupaten Barru agar tetap berjalan. Mulai dari mempromosikan produknya, dan memberikan

browser. Adapun bantuan dari pemerintah dalam UMKM yang ada di Kabupaten Barru saat ini yaitu pengurangan biaya listrik dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk modal usaha.

Penggunaan teknologi pada saat ini sangat mempengaruhi masyarakat dalam meningkatkan penghasilan maupun penjualan produk usahanya, tetapi masih ada beberapa UMKM yang mengalami kendala dalam hal pemasaran dan produksi serta kurang pemahannya palaku UMKM akan pentingnya manajemen usaha dan masih terdapat produk-produk UMKM yang masih belum dikenal oleh masyarakat sehingga produk yang memiliki potensi besar menjadi salah satu produk unggulan di Kabupaten Barru tidak mengalami peningkatan atau tidak dapat dikembangkan dengan baik.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melibatkan observasi langsung terhadap program-program pemerintah, wawancara dengan pejabat pemerintah dan pelaku UMKM, serta dokumentasi dari laporan dan arsip terkait. Analisis data dilakukan melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.



Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Kebijakan pemerintah di Kabupaten Barru dalam meningkatkan produk unggulan UMKM dinilai berdasarkan enam indikator: efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini telah diterapkan dengan baik, dengan dukungan berupa pelatihan, bantuan teknis, dan akses pasar. Program-program tersebut membantu UMKM untuk meningkatkan kualitas produk dan memperluas jangkauan pasar mereka.

Dalam penelitian mengenai penerapan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produk unggulan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Barru, beberapa indikator evaluasi telah dianalisis. Berikut adalah ringkasan dari hasil penelitian dan kesimpulannya:

Efektivitas berkaitan dengan pencapaian hasil atau tujuan yang diharapkan dari kebijakan yang diterapkan. Dalam hal ini, peneliti menemukan bahwa kebijakan pemerintah telah berhasil meningkatkan produk unggulan UMKM melalui berbagai cara, seperti pembinaan, pelatihan, pameran, dan bantuan permodalan. Ibu Herawati, S.E, dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, menyatakan bahwa kebijakan ini telah efektif, dan Ibu Hj. Nurmila Main, S.Sos, menambahkan bahwa pameran yang sering diadakan telah membantu masyarakat mengenal produk UMKM. Pelaku usaha seperti Ibu Rahima dan Ibu Suleha Bintang juga mengonfirmasi bahwa mereka terus meningkatkan kualitas produk dan inovasi untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Berdasarkan temuan ini, efektivitas kebijakan pemerintah dalam meningkatkan produk unggulan UMKM di Kabupaten Barru dapat dikategorikan baik.

Efisiensi mengacu pada penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai efektivitas tertentu. Dalam hal ini, hasil wawancara menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dilaksanakan tepat waktu dan dengan biaya yang efisien. Ibu Herawati, S.E, dan Ibu Hj. Nurmila Main, S.Sos, mengonfirmasi bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan dengan efisien. Pelaku usaha seperti Ibu Suarsi dan Bapak Daksul juga menyatakan bahwa pengelolaan modal usaha mereka sudah dilakukan dengan efisien. Oleh karena itu, efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk UMKM di Kabupaten Barru telah tercapai dengan baik.

Kecukupan berkaitan dengan sejauh mana efektivitas memenuhi kebutuhan atau harapan pelaku usaha. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat merasa puas dengan kebijakan

pemerintah yang meningkatkan produk unggulan UMKM. Ibu Herawati, S.E, menyatakan bahwa masyarakat telah merasakan peningkatan taraf hidup, dan Ibu Hj. Nurmila Main, S.Sos, menjelaskan bahwa program kebijakan ditentukan berdasarkan data dan kebutuhan pelaku usaha. Bapak Zainal Abidin menambahkan bahwa permodalan yang diterima sudah mencukupi untuk usaha mereka. Kesimpulannya, kecukupan dalam kebijakan pemerintah untuk UMKM di Kabupaten Barru dikategorikan baik karena kebijakan yang diterapkan telah memenuhi kebutuhan pelaku usaha.

Pemerataan mengacu pada distribusi akibat dan usaha secara adil antar kelompok dalam masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah telah tepat sasaran dan bermanfaat bagi pelaku usaha. Ibu Herawati, S.E, dan Ibu Hj. Nurmila Main, S.Sos, menjelaskan bahwa kebijakan sudah sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha dan distribusi bantuan dilakukan secara adil. Pelaku usaha seperti Ibu Rahima dan Bapak Pannikai mengonfirmasi bahwa bantuan dan modal yang diterima telah merata. Dengan demikian, kebijakan pemerintah dalam hal pemerataan di Kabupaten Barru sudah cukup baik.

Responsivitas berkaitan dengan seberapa jauh kebijakan memenuhi kebutuhan dan preferensi kelompok masyarakat tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah telah mendapatkan dukungan karena memenuhi kebutuhan pelaku usaha. Ibu Herawati, S.E, dan Ibu Hj. Nurmila Main, S.Sos, menjelaskan bahwa program disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan pelaku usaha. Pelaku usaha seperti Ibu Suarsi dan Ibu Amila Amin menunjukkan bahwa produk UMKM dipasarkan melalui berbagai saluran sesuai dengan kebutuhan pasar. Kesimpulannya, responsivitas kebijakan pemerintah terhadap kebutuhan UMKM di Kabupaten Barru sudah terbilang baik.

Ketepatan berkaitan dengan asumsi yang melandasi tujuan kebijakan dan dampak positif yang dirasakan. Penelitian menunjukkan bahwa program pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha dan telah meningkatkan keterampilan mereka. Ibu Herawati, S.E, dan Ibu Hj. Nurmila Main, S.Sos, mengonfirmasi bahwa kebijakan pemerintah membawa perubahan positif dalam pemasaran dan pengelolaan produk. Oleh karena itu, ketepatan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan UMKM di Kabupaten Barru dikategorikan baik.

Namun, terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah. Salah satunya adalah keterbatasan biaya. Ibu Herawati, S.E, mengemukakan bahwa biaya yang

terbatas menjadi kendala dalam mengikuti pameran dan pelaksanaan program pelatihan. Selain itu, kurangnya pelaku usaha yang mengikuti program juga menjadi masalah. Ibu Hj. Nurmila Main, S.Sos, menyatakan bahwa terbatasnya jumlah pelaku usaha yang mengikuti program pemerintah menghambat pelaksanaan kebijakan.

Secara keseluruhan, kebijakan pemerintah dalam meningkatkan produk unggulan UMKM di Kabupaten Barru menunjukkan hasil yang baik dalam hal efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan biaya dan kurangnya pelaku usaha.

2. Pembahasan

Penelitian ini mengkaji penerapan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produk unggulan UMKM di Kabupaten Barru dengan fokus pada efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

- a. **Efektivitas:** Kebijakan terbukti efektif dalam mencapai tujuan, yaitu peningkatan produk UMKM. Pembinaan, pelatihan, dan bantuan permodalan berhasil meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar UMKM, sesuai dengan pernyataan para informan.
- b. **Efisiensi:** Kebijakan diterapkan dengan biaya yang efisien. Wawancara menunjukkan bahwa program dilaksanakan tepat waktu dan dengan anggaran yang optimal, serta pengelolaan modal oleh pelaku usaha juga efisien.
- c. **Kecukupan:** Kebijakan memenuhi kebutuhan pelaku usaha dengan baik. Program-program yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, seperti yang diungkapkan oleh pelaku usaha dan pihak pemerintah.
- d. **Pemerataan:** Manfaat kebijakan didistribusikan secara adil. Program pemerintah tepat sasaran dan memberikan manfaat kepada semua pelaku usaha yang terdaftar.
- e. **Responsivitas:** Kebijakan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha. Program pelatihan dan pameran disesuaikan dengan preferensi dan kebutuhan pelaku usaha.
- f. **Ketepatan:** Kebijakan tepat dalam mencapai tujuan. Program pelatihan dan bantuan meningkatkan keterampilan pelaku usaha, dengan dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat.

Faktor Penghambat: Terdapat kendala seperti keterbatasan biaya dan kurangnya pelaku usaha yang mengikuti program, yang dapat mengurangi efektivitas kebijakan.

Secara keseluruhan, kebijakan pemerintah dalam meningkatkan produk unggulan UMKM di Kabupaten Barru dinilai baik, tetapi perlu perbaikan dalam mengatasi kendala biaya dan partisipasi pelaku usaha.

D. KESIMPULAN

1. Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan produk unggulan UMKM di Kabupaten Barru menunjukkan hasil yang positif dalam beberapa aspek utama. Dari segi efektivitas, kebijakan berhasil meningkatkan kualitas produk UMKM dan memperluas pasar mereka. Efisiensi dalam pelaksanaan program juga terjaga dengan baik, meskipun ada keterbatasan biaya yang menjadi kendala. Kecukupan kebijakan dirasakan oleh pelaku usaha, karena program yang disediakan memenuhi kebutuhan mereka dan meningkatkan taraf hidup. Pemerataan manfaat kebijakan juga dilakukan secara adil, dengan manfaat yang dirasakan secara merata oleh semua pelaku usaha yang terdaftar. Responsivitas kebijakan terhadap kebutuhan pelaku usaha cukup baik, dengan program yang sesuai dengan preferensi mereka. Ketepatan kebijakan juga terlihat dalam pelatihan dan bantuan yang diberikan, yang telah berhasil meningkatkan keterampilan dan pemasaran produk UMKM.
2. Terdapat beberapa faktor penghambat seperti keterbatasan biaya dan kurangnya partisipasi pelaku usaha dalam program yang perlu diatasi. Secara keseluruhan, meskipun kebijakan sudah efektif dan efisien, upaya lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi kendala dan memastikan bahwa semua pelaku usaha dapat memanfaatkan kebijakan dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Awan Y, Y. R. 2016. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA, CV.
- Hamdani. 2020. *Mengenal Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Nurdin, I. 2017. *Etika Pemerintah Norma, Konsep, dan Praktek Bagi Penyelenggara Pemerintahan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.

- Sandu Siyoto, A. S. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, CV. ISBN: 979-8433-64-0
- Taslim Sjah, Z. 2019. *Pengembangan Produk Unggulan Desa*. Jakarta.
- Uddin B, S. 2017. *Kebijakan Publik*. Makassar: CV SAH MEDIA.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah